

**FENOMENA DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI
PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL MENURUT
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**DIMAS PANGASTUTI
NPM. 1621020470**

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/ 2020M**

**FENOMENA DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI
PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL MENURUT
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**DIMAS PANGASTUTI
NPM. 1621020470**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Drs. H Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M
Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/ 2020M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat akan terlebih dahulu penulis jelaskan secara singkat beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Seperti tertera di halaman muka, skripsi ini berjudul : **“Fenomena Dan Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam”**, adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan sebagai berikut.

1. **Fenomena** adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera, dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah, seperti fenomnea alam, gejala, orang atau (kejadian, benda dan sebagainya) yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya, satu hal yang lain dari pada yang lain, fakta atau kenyataan.¹
2. **Pemerintah** ialah sebagai tindakan yang terus-menerus (kontinyu) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Permata Press,2019), h. 272

² E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineja Cipta, 2002), h. 11

3. **Kota Bandar Lampung** adalah sebuah Ibu Kota Provinsi yang terdapat di Provinsi Lampung. Di pimpin oleh Wali Kota Bandar Lampung.
4. **Ilegal** adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sah, bertentangan dengan hukum.³
5. **Prespektif** merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.⁴
6. **Hukum Islam** ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an atau Hukum Syara.⁵
7. **Pengatur Lalu Lintas Ilegal (PLLI)** adalah satu orang atau lebih orang yang menyandang tuna karya (bukan ASN dan Petugas Kepolisian Lalu Lintas). Yang mengais rejeki dengan memberikan jasa pengaturan lalu lintas secara ilegal. Istilah lain yang berkembang dalam masyarakat terkait Pengatur Lalu Lintas Ilegal (PLLI) adalah "*Pak Ogah*".

Berdasarkan penjelasan dan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul "Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam" adalah sebuah kajian

³ Ibid, h. 178

⁴ Ibid, h. 421

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Permata Press, 2019), h. 272

terhadap sebuah kenyataan sosial dalam bentuk aksi Pengatur Lalu Lintas Ilegal dalam menata lalu lintas di jalan raya dilihat dari Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul.

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi ini adalah :

1. Alasan Objektif.

Fenomena pengatur lalu lintas ilegal cenderung meningkat dengan segala kompleksitas permasalahannya. Meskipun pada satu sisi keberadaan pengatur lalu lintas sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada pengendara, guna mendukung kelancaran arus lalu lintas, namun pada sisi lain fakta-fakta di lapangan menunjukkan banyak terjadi premanisme, vandalisme pada kendaraan, pemaksaan imbalan yang dilakukan pengatur lalu lintas ilegal, termasuk kecelakaan akibat minimnya pengetahuan pengatur lalu lintas ilegal. sementara peraturan sendiri belum memiliki kejelasan atas status yang dimiliki mereka, termasuk dalam kalangan masyarakat sendiri masih terdapat pro dan kontra apakah pengatur lalu lintas yang demikian ini bermanfaat atau tidak. Hal-hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut sekaligus untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung dalam menertibkan keberadaan mereka.

2. Alasan Subyektif.

- a. Topik ini memungkinkan untuk dibahas dan sangat relevan dengan Jurusan Siyasa. Disamping itu literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan ini tersedia dan memadai sehingga penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- b. Untuk memenuhi salah satu tugas akademik sekaligus sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah.

Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam menata lalu lintas dan angkutan jalan.⁶ Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa keikutsertaan warga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar dan aman. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi itu lambat laun berubah fungsi menjadi aksi anarki dan kriminal sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Di beberapa tempat di Indonesia, aksi premanisme, pemaksaan imbalan dan vandalisme pada kendaraan banyak terjadi yang

⁶ Menurut Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.” (On-line) tersedia di <https://www.google.com/search?q=uu+nomor+22+tahun+2009&oq=uu+nomor+22+tahun+2009&aqs=crome..69i57.10716joj7&sourceid=crome&ie=UTF-8> Minggu (26 Mei 2019 19:28 WIB)dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

dilakukan oleh individu yang beraksi sebagai pengatur lalu lintas ilegal. Termasuk kecelakaan yang timbul akibat minimnya pengetahuan mereka tentang aturan lalu lintas.

Sementara itu, di kalangan masyarakat sendiri masih terdapat perbedaan pandangan tentang keberadaan pengatur lalu lintas semacam itu. Sebagian berpendapat bahwa pengatur lalu lintas yang demikian itu sama sekali tidak dibutuhkan karena sudah ada petugas yang resmi untuk itu, baik di kalangan aparat kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan. Sementara sebagian lain justru berpendapat bahwa keberadaan mereka dibutuhkan dan bermanfaat karena membantu para pengemudi dalam meancarkan arus lalu lintas khususnya di tempat-tempat tertentu yang rawan kecelakaan.

Terlepas dari pro dan kontra pandangan masyarakat terhadap keberadaan pengatur lalu lintas ilegal, kenyataan di lapangan memang menunjukkan dua fakta yang paradoks. Fakta yang pertama bahwa tenaga pengatur lalu lintas yang resmi (Polisi dan aparat Dinas Perhubungan) termasuk lampu lalu lintas masih sangat minim dan terbatas, sementara jumlah kendaraan dan wilayah rawan kemacetan sedemikian banyak sehingga tidak mampu untuk dicover oleh aparat yang masih sangat minim tersebut. Selain dari pada itu, jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi masyarakat, para pengatur lalu lintas tidak resmi itu umumnya berasal dari kalangan tidak mampu atau miskin, sehingga dengan mereka berada di jalan raya dan berperan sebagai pengatur lalu lintas ilegal mereka akan mendapatkan pegasilan yang dapat membantu ekonomi

keluarga. Dengan kata lain, aksi mereka secara tidak langsung dapat menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran dan sekaligus meminimalisir jumlah pelaku kejahatan. Dari sisi ini nampak jelas bahwa keberadaan pengatur lalu lintas ilegal sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif baik untuk ketertiban lalu lintas maupun untuk mencegah meningkatnya jumlah pelaku kejahatan.

Di pihak lain, banyak fakta menunjukkan bahwa keberadaan pengatur lalu lintas ilegal ini nampak buruk pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan terakhir yang terjadi di beberapa kota besar di mana aksi-aksi para pengatur lalu lintas ini cenderung menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan para pengemudi kendaraan karena banyaknya aksi premanisme, pemaksaan, termasuk aksi vandalisme pada kendaraan yang dilakukan oleh pengatur lalu lintas ilegal. Kecenderungan semacam ini sudah tentu mengakibatkan keberadaan mereka menjadi kontraproduktif bagi kemaslahatan masyarakat luas sehingga hal ini berpotensi untuk mengancam keselamatan diri mereka sendiri.

Bertitik tolak dari fakta yang saling bertolak belakang ini sekaligus untuk mengetahui sejauh mana negara hadir dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Fenomena dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam”.

D. Batasan Masalah.

Penelitian ini difokuskan pada fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang dapat ditemui di Kota Bandar Lampung khususnya yang berada di Jalan Ir. Soekarno Hatta (mulai dari SMK-SMA Yadikan Bandar Lampung sampai SMAN 5 Bandar Lampung, dan di Jalan Z.A. Pagar Alam, (mulai dari Museum Lampung hingga Mall Boemi Kedton). Jalan Sultan Agung berlanjut ke Jalan Rya Cudu lalu berlanjut ke arah perumahan KORPRI, dan sekitaran Jalan Teuku Umar Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah.

Adapun pokok-pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan pada dua hal yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran fenomena pengatur lalu lintas ilegal di Kota Bandar Lampung dan sejauh mana upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi/ menertibkan fenomena tersebut ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pengatur lalu lintas ilegal di Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui gambaran fenomena pengatur lalu lintas ilegal di Kota Bandar Lampung dan sejauh mana upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi/menertibkan fenomena tersebut.

2. Untuk mengetahui prespektif Hukum Islam mengenai pengatur lalu lintas ilegal.

G. Signifikansi Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat muncul dari penelitian ini adalah :

1. Membawa wawasan sekaligus pemahaman bagi arah pembaca mengenai fenomena penagtur lalu lintas ilegal yang akhir-akhir ini marak terdapat di Kota Bandar Lampung.
2. Menjadi bahan acuan atau referensi awal bagi kalangan akademisi yang berniat untuk meneliti fenomena tersebut secara lebih lanjut.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemerintahan khususnya di Kota Bandar Lampung dalam menentukan kebijakan di bidang transportasi dan angkutan jalan dalam upaya mewujudkan Kota Bandar Lampng yang tertib, aman dan sejahtera.

H. Metode Penelitian.

Penggunaan metode dalam penelitian merupakan hal yang mutlak dan menjadi keharusan dalam meneliti suatu masalah. Hal ini dimaksudkan bukan saja untuk mempermudah prses kinerja penelitian tetapi yang lebih penting lagi agar penelitian yang dilakukan dapat lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis penelitian.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna dari suatu fakta yang terjadi di tengah masyarakat.⁷

b. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.⁸ Sedangkan kualitatif memiliki makna bahwa penelitian ini tidak digunakan data atau perhitungan statistik yang umumnya ditemui dalam penelitian kualitatif.

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan fenomenologis yang mengandung arti suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, dalam bentuk laporan terperinci

⁷ Salon Praji Pratama, "Probematika Penerapan Metode Field Research untuk penelitian arsitektur vernacular di Indonesia". Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 34 No.1 (Bandung 2006), h. 59.

⁸ Tjuri Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Bandung : UPI. Stuss, 2012), h. 2.

yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* atau latar ilmiah.⁹

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data empiris yang valid dan memiliki kriteria tertentu yang diperoleh melalui cara-cara tertentu, sistematis, terkontrol, serta menggunakan langkah-langkah yang logis.¹⁰

2. Populasi, *Sampling*, dan Teknik Pengambilan Sampel.
 - a. Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya tidak terbatas.¹¹ Populasi bisa terdiri atas orang atau objek seperti luas dan jenis tanah, penggunaan sawah, perusahaan sejenis dan sebagainya.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari: para pelaku pengatur lalu lintas ilegal dan aparat pemerintah (Kepolisian dan Dinas Perhubungan).
 - b. Sampel. Sampel merupakan bagian suatu objek yang mewakili populasi.¹³ *Sampling* akan menentukan validitas eksternal dari suatu hasil penelitian.¹⁴

⁹ Warul Walidin, Saifullah, Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2006), h. 75

¹⁰ Ibid.

¹¹ Salmon Praiji Pratama, "Problematisa Penerapan Metode Field Research untuk penelitian arsitektur vernacular di Indonesia," h.59

¹² Ibid.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 11

¹⁴ Ibid.

c. Teknik pengambilan Sampel.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel secara cermat serta mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan memiliki ciri-ciri yang spesifik.¹⁵ Dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih individu yang benar-benar memiliki pengetahuan yang mempunyai dengan topik yang akan diteliti.¹⁶ Adapun individu yang dimaksud adalah para pengatur lalu lintas ilegal yang berjumlah empat orang. Pengemudi kendaraan dan masyarakat yang berjumlah enam orang. Aparat kepolisian berjumlah dua orang. Personil polisi pamong praja satu orang.

3. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang ada berupa informasi, keterangan ataupun catatan-catatan tertentu yang terkait erat dengan fenomena pengatur lalu lintas ilegal di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa keterangan, informasi atau gambaran tentang keadaan di lapangan

¹⁵ Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta ;PT. Bumi Aksara, 2006), h. 46

¹⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Sekunder*, (Depok :PT. Raja Grafindi, 2014), h.22

yang penulis peroleh melalui wawancara dengan figur-figur tertentu dan hasil pengamatan atau (observasi).

- b. Data Sekunder adalah data yang bersifat penunjang yakni informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang berupa buku, literatur, artikel atau bahan-bahan informasi tertentu yang berkait erat dengan topik penelitian. Buku/literature dimaksud meliputi buku-buku Fiqh, artikel-artikel tertentu, surat kabar, catatan/dokumen tertentu serta peraturan pemerintah yang berkenaan dengan lalu lintas.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Secara umum metode atau teknik yang penulis lakukan dalam tahapan pengumpulan data meliputi metode-metode berikut :

- a. Wawancara merupakan salah satu teknik dari beberapa teknik dalam pengumpulan informasi atau data.¹⁷ wawancara atau *interview* berasal dari kata *entervue* yang berarti pertemuan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.¹⁸ Nazir mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan acara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.¹⁹

¹⁷ Fendi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta :PT Leutika Nouvalitera, 2016) h.1

¹⁸ Ibid, h. 2

¹⁹ Ibid, h.3

- b. Observasi, metode ini dilaksanakan dalam bentuk pengamatan secara langsung terhadap fakta di lapangan.²⁰ Pengertian lain dari observasi ialah merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu.²¹ Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.²²
- c. Dokumentasi, metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk penelaahan terhadap buku, artikel, transkrip, atau catatan tertentu yang dibutuhkan dalam pembahasan.²³

5. Metode Pengolahan Data.

- a. Editing, adalah suatu kegiatan mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah valid, benar, lengkap, sesuai atau relevan dengan masalah yang hendak diteliti.²⁴
- b. Coding, yakni pemberian tanda pada data yang diperoleh baik permohonan atau penggunaan tanda, simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, klasifikasi data sesuai dengan masing-

²⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data Sekunder*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2014), h.31

²¹ Nimatuzahroh, *Susanti Prasetyaningrum, Observasi : Teori dan Aplikasi Psikologi*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 3

²² Ibid, h.4

²³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder*, (Depok : PT. Raja Grafindo, 2014), h. 32

²⁴ Ibid.

masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan memudahkan analisis data.²⁵

- c. Sistematisasi, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah, dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis, dari yang sudah diteliti dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.²⁶

6. Analisi Data.

Setelah data yang diperlukan terkumpul dan diolah melalui teknik-teknik di atas, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari narasumber.²⁷

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik *induktif*, yaitu *induktif* dalam konteks ini peneliti melahirkan teori baru atau mengembangkan teori berdasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian lapangan.²⁸ Ini berarti penelitian kualitatif bersifat eksploratif disebabkan terbatasnya pengetahuan tentang suatu tema penelitian.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Galang Surya Gumilang, "Setelah data yang diperlukan terkumpul dan diolah melalui teknik-teknik di atas, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis secara deskriptif kualitatif", Jurnal Fokus Konseling Vol.2 No. 3(Agustus 2016), h.144.

²⁸ Ibid.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban bekerja dan larangan mengemis dalam perspektif Islam.

Bekerja adalah sebuah usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah dan memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima imbalan).²⁹

Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi dalam bekerja, prinsip yang mendasar dalam Islam adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang bernilai dan bermanfaat.³⁰ Sebaliknya, pekerjaan yang sia-sia dan membawa *kemudharatan* dinyatakan sebagai pekerjaan yang terlarang bahkan dianggap sekutu setan.³¹

Dalam A-Qur'an terdapat beberapa istilah yang mengandung arti kerja. Misalnya *amal*, *Kasb*, *sakhkhara*, *ajr*, *ibtigha'a fadl Allah* dan lain sebagainya. Dalam hadist banyak pula disebutkan kata *amal* dengan arti keajinan tangan atau perbuatan jasmaniah pada umumnya. Sementara dalam Al-Qur'an kata iman seringkali diikuti dengan kata *amal shalih* yang berarti bahwa iman yang tertanam dalam hati hanya akan

²⁹ Fachri Fachrudin, Fiqh Bekerja "Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia" *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (21 Desember 2019), h. 59

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

berarti apabila membuahkan perbuatan lahiriah yang nyata sesuai dengan tuntunan iman itu sendiri.³²

Dapat dipahami bahwa kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tidak mengenal lelah, namun juga mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekeliling serta negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyambungkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat maupun negara tanpa menyusahkan dan menjadi beban bagi orang lain.

Etika bekerja Islami yang harus diperhatikan adalah petunjuk *Syariah* bahwa penyelesaian kerja apapun secara baik adalah penting untuk menunjang kehidupan diri sendiri dan keluarga, dan ini dimata Tuhan, mempunyai nilai yang sebanding dengan ditunaikannya kewajiban-kewajiban keagamaan yang diklasifikasikan sebagai wajib.³³

Islam memandang pekerjaan sebagai sebuah hal yang mulia dan dapat mendatangkan manfaat bagi umat manusia. Hal ini telah diterangkan dalam ayat Al-Qu'ran dan juga Hadist tentang anjuran bagi umat muslim untuk bekerja agar

³² Ibid, h. 60

³³ Sahmiar Pulungan, "Etika bekerja Islami yang harus diperhatikan adalah petunjuk *Syariah* bahwa penyelesaian kerja apapun secara baik adalah penting untuk menunjang kehidupan diri sendiri dan keluarga". *Etos Kerja dan Etika Profesi Dalam Pandangan Islam*, Vol.3 No.2 (Juli 2014), h. 513

terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Firman Allah Q.S Ar-Rahman (55) : 13 yang berbunyi :

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

Artinya : “Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan” (Q.S At-Rahman (55) :13)³⁴

Dapat dipahami ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan dunia penuh dengan karunia yang tidak terbatas bagi umat manusia. Namun demikian rezeki hanya bisa didapat dengan cara berusaha, ber-*ikhtiar* dan bekerja, apakah dalam bentuk kerja keras ataupun tidak, dan berapa besar rezeki yang diperoleh seseorang tergantung dengan usaha yang dilakukannya. Dengan kata lain, apabila seseorang terjun langsung ke lapangan kerja (*ma'asy* atau '*amal*'), karena kerja seorang muslim yang sesuai dengan ketentuan Islam merupakan sumber utama keuntungan/pendapatan. Menurut Ibnu Khaldun, rezeki dan nafkah pengertiannya sama, yaitu penghasilan yang bermanfaat dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁵

Didalam sejumlah ayat yang lain Allah SWT berfirman, Q.S. At-Taubah (9):105 :

³⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Samad : Jakarta Pusat 2017) h. 531

³⁵ Artikel On-Line tersedia di https://media.neliti.com/media/publications/56380_ID_kosepsi-Islam-tentang-kerja-rekonstruksi.pdf, pekerjaan halal. Diakses pada tanggal 03 Januari 2020 pukul 21:11 WIB dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, h.1.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ”. (Q.S. At-taubah (9):105)³⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa bekerja haruslah sesuai dengan tuntunan Al-Quran sebab Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh umat-Nya. Kelak setiap manusia akan diperlihatkan dan bertanggung jawab atas apa yang selama ini mereka kerjakan di Bumi.

Kemudian Q.S. Al-Jumu'ah (62):10 yang berbunyi :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ
 فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Artinya : “apabila solat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan

³⁶ Artikel on-line tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/56380-ID-konsepsi-islam-tentang-kerja-rekonstruks.pdf> pekerjaan halal. diakses pada tanggal 03 Januari 2020 21:11 WIB dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, h. 1

ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.
(Q.S. Al-Jumu'ah (62) :10)³⁷

Dapat dipahami ayat di atas menerangkan bahwa umat muslim dalam menacri nafkah harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. dengan kata lain, rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal dan diberkahi Allah SWT. Harta yang diperoleh dengan jalan halal akan berpengaruh pada diri orang yang menerimanya baik ia mejadi amal shalih, amupun sebagai pencegah dan penawar penyakit. Sebaliknya, harta yang diperoleh dari pekerjaan yang haram cenderung akan menimbulkan tiga hal :

1. Tidak terkabulnya doa, diantara hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah karena harta yang kita makan dan minum adalah harta yang haram. Allah SWT berfirman Q.S Al-Mukminun (23);51 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya : “Allah berfirman, wahai para Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan sungguh Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Mmukminun (23):51)³⁸

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat :Samad, 2017), h.554

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat : Samad,2017), h.345.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman ! makanlah rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 172).³⁹

2. Rusaknya anak keturunan. Banyak orang mengeluhkan rusaknya pendidikan dan juga ahklak serta moral anak keturunan mereka walaupun segala fasilitas telah tersedia dan memadai. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena anak keturunan kita tumbuh dari hal yang haram, berpakaian dengan yang haram, makan dan minum dengan hal yang diperoleh dengan cara yang haram sehingga Allah menjauhkan merka dari akhlak yang Islami. Ini berarti sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah keluarganya dengan cara yang halal, sebagaimana firman Allah SWT, Q.S At-Tahrim (66) : 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

³⁹ Ibid, h.26

Artinya : *“wahai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya adalah malaikat yang kasar, dank eras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (Q.S At-Tahrim (66) : 6).⁴⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya agar selalu menjaga keluarga dari siksa api neraka yang merupakan bahasan atas perbuatan yang kita perbuat selama di dunia.⁴¹ Maka dari itu jika kita menginginkan anak keturunan yang patuh terhadap nilai-nilai Islami hendaklah kita memeberikan mereka nafkah yang halal dan menjauhkan mereka dari harta yang diperoleh dengan cara haram.⁴²

3. Menjadi Sumber Mala Petaka. Dunia dan seisinya merupakan ciptaan Allah SWT. Tentu kitapun beriman bahwa satu-satunya cara yang dapat untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian ialah dengan mengindahkan syariat Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl (16) : 97 yang berbunyi :

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta Pusat :Samad, 2017), h. 560

⁴¹ Amru Nur Kholis, *Pekerjaan Haram di Akhir Zaman*, (Semarang :Granada Media Tama, 2017), h. 34

⁴² Amru Nur holis, *Pekerjaan Haram di Akhir Zaman*, (Semarang : Granda Media Tama,2017), h. 34

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya : “Barangsiapa mengerjakan kebajikan laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami berikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”. (Q. An-Nahl (16) :97).⁴³

Dapat dipahami bahwa ayat ini menerangkan bahwa setiap aktivitas beramal shalih akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah SWT dan Allah akan lipat gandakan balasan baik bagi hambanya yang bertakwa. Sebaliknya jika kita mengerjakan amalan yang buruk seperti mencari nafkah dengan cara yang buruk maka Allah akan balas dengan balasan yang buruk pula. Kethuilah, banyak cara-cara yang kita tempuh untuk mendapatkan harta dari Allah dengan cara-cara yang dilarang oleh Syariat-Nya.

B. Mengemis dalam perspektif Fiqih Siyasah

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut “*tasawwul*”. Disalam kitab *Al-Mu’jam Al-Wasith* disebutkan “*tasawwul*” (bentuk *fi’il* madhi dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemebrian. Sebagaimana ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta Pusat :Samad,2017), h. 278

meminta harta orang lain bukan untuk *kemaslahatan* agama melainkan untuk kepentingan pribadi.⁴⁴

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tidak pernah menyariatkan perbuatan meminta-minta dengan menipu seseorang atau memanipulasi kondisi sebenarnya untuk mendapatkan uang. Menurut Hadist Bukhari no. 1472, Hadist Muslim no. 1035 dan lainnya ialah :

يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ
بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ
يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، أَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya : “Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya (tidak tamak dan tidak mengemis), maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah” (HR. Bukhari no. 1472 dan Muslim no. 1035).

⁴⁴ Amrul ur Kholis, *Pekerjaan Haram di Akhir Zaman 15 Profesi Haram yang akan Meraja Lela menjelang Datangnya Hari Kiamat*(Surakarta : Graha Mediatama, 2017), h. 173

Hadist ini menerangkan tentang *ta'afuf* (memelihara diri dari tindakan meminta-minta terhadap sesama manusia), sebab hal tersebut lebih baik.

Islam telah mengatur segala sesuatu baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Berikut merupakan ketetapan Allah terkait larangan meminta-minta dan mengemis.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِيلَ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَ

Artinya : “Barangsiapa meminta kepada orang lain demi memperbanyak hartanya maka berarti ia meminta bara api. Karena itu terserahlah ia mau menyedikitan atau memperbanyaknya” (H.R Muslim no. 1041)⁴⁵

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya : “Tak henti-hentinya seseorang meminta kepada orang lain, sampai ia datang di hari kiamat dalam keadaan tak ada sepotong dagingpun di wajahnya” (HR. Buhari no 1471, Muslim no.1040).⁴⁶

⁴⁵ Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Sahih Muslim*, (Semarang :CV.Asy Syifa,1993), h.228

⁴⁶ Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Sahih Muslim*, (Semarang :CV.Asy Syifa,1993), h.229

Demikian pula dalam hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَخْطُبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ

Artinya : *“Sungguh, jika sekiranya salah seorang di antara kalin mengikat seberkas kayu lalu dipanggul di atas punggungnya dan ia jual, itu adalah lebih baik dari pada ia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau tidak”*. (HR. Bukhari, no 1470 : Muslim, no. 1042, Tirmidzi, no. 680 dan Nasa-i, V/96).⁴⁷

Dapat dipahami bahwa hadist di atas menjelaskan betapa hinanya seseorang yang mampu bekerja namun ia memilih jalan meminta-minta untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Allah tidak menyukai orang yang meminta-minta padahal seorang tersebut mampu bekerja dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Rasulullah mendefinisikan bahwa orang yang masih memiliki kekuatan untuk bekerja namun memilih jalan meminta-minta kelak pada hari kiamat akan menjadi orang yang serba kekurangan bahkan di hadapan Allah SWT orang tersebut tidak memiliki sepotong dagingpun di wajahnya. Dan Allah lebih menyukai orang-orang yang berusaha mencari

⁴⁷ Ibid, h. 228

kayu bakar kemudian menjualnya sebagai usaha mencari nafkah dari pada tindakan meminta-minta kepada orang lain.

Tindakan meminta-minta diperbolehkan oleh Allah SWT apabila seseorang mengalami tiga hal seperti yang tertulis dalam haist shahih yang diriwayakan oleh Muslim, Abu Dawud, Ahmad, An-Nasa-i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ « أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُرَ لَكَ بِهَا ». قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَنَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْجَبَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُبْحَنَا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْرًا

Artinya : “Hai Qabishah! Meminta itu tidak diperbolehkan, kecuali bagi salah seorang di antara tiga (1) seorang yang membayar tanggungan. Dia boleh meminta, sampai dia dapat membayar tanggungannya (tanggungan yang di sanggupinya

ketika mendamaikan dua golongan yang sedang bertikai), kemudian setelah itu dia menahan diri untuk meminta, (2) seseorang yang terkena bencana yang merusak hartanya. Dia boleh meminta, hingga dia memperoleh keteguhan diri dari kehidupannya (atau dapat memenuhi hajat hidupnya), (3) seseorang yang tertimpa kemelaratan sehingga tiga orang yang berakal di antara kaumnya menyatakan : "benar-benar si Fulan telah tertimpa kemelaratan". Dia boleh meminta, sampai ia memperoleh keteguhan diri dari penghidupannya (atau dapat memenuhi hajat hidupnya). Peminta dengan selain ketiga alasan tersebut -hai Qabishah- adalah haram. Orang yang memintanya juga haram memakanya." (Shahih: HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad, an-Nasa-i, dan selainnya).⁴⁸

Dapat dipahami bahwa berdasarkan hadist-hadist yang tertera di atas menjadi bukti bahwa mengemis merupakan aktivitas mencari uang atau nafkah dengan mencari keuntungan melalui cara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Manusia dikaruniai Allah SWT akal sehat hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik, karunia Allah yang luar biasa tersebut semestinya dapat dipergunakan untuk menemukan cara bagaimana mencari rezeki sesuai dengan syariat dalam Islam.

⁴⁸ Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Sahih Muslim* (Semarang : CS. Asy Syifa, 1993), h. 231

C. *Al-Maslāhah Al-Mursālah dan Sadd Adz Dzara'i..*

Al-Maslāhah Al-Mursālah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslāhah* dan *mursālah*. Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja Bahasa Arab (يَصْلُحُ -صَلَحَ) menjadi (مصلحة) yang berarti (صُلَاحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti suatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *masalahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (الإِصْلَاحُ طَلَبُ). Orang Arab mengungkapkan bahwa kata *maslāhah* berarti segala tindakan atau perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia. Selain itu, kata *maslāhah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Kata *maslāhah* sama persis dengan kata *manfa'ah* yang secara *wazn* maupun maknanya.⁴⁹

Adapun kata *mursālah*, kata ini adalah isi *maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu (لَسَرَ), dengan penambahan huruf “alif” pada pangkalnya, sehingga menjadi (لَسَرَا). Secara etimologis artinya “terlepas” atau “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maslāhah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.⁵⁰

Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perasaan, adat, dan etika seseorang. Misalnya, dahulu orang-orang Jahiliyah menganggap

⁴⁹ Abdul Hayy Abdul „Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014),h.313

⁵⁰ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.121

mengubur bayi hidup-hidup dan menghalangi mereka mendapat warisan adalah sebuah *kemaslahatan* (baik). Namun tradisi itu ditinggalkan saat Islam datang karena mengandung *kemudharatan* dan tidak sesuai dengan *syara'* serta beberapa perkara lainnya yang telah dibatalkan oleh *yara'*. *Kemaslahatan* yang *syar'i* adalah *kemaslahatan-kemaslahatan* yang selaras dengan tujuan *syara'* (*Muqashid Syari'ah*). dan ditegaskan oleh dalil khususnya Al-Quran atau Sunnah, atau *ijma'* atau *qiyas*.⁵¹

Para faquha sepakat bahwasanya *Al-Maslāhah Al-Mursālah* dapat dijadikan sumber hukum sepanjang ia baik menurut akal, selaras dengan hukum, tujuan, dan petunjuk *syara'* dan dilakukan berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kebaikan bagi manusia dan menghindari *keudharatan*. Adapun yang menjadi objek kajian *Al-Maslāhah Al-Mursālah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditatpkan hukumnya tetapi tidak ada saupun nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang dapat dijadikan dasarnya. Prisnip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh. Menurut Imam Al-Qarafi Ath-Thusi dalam kitabnya *Al-Maslāhah Al-Mursālah*, menjelaskan bahwa *Al-Maslāhah Al-Mursālah* itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dibidang *mu'amalah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya,

⁵¹ Ibid, h. 315.

karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.⁵²

Sementara *Sadd Adz-Dzara'i* secara terminologi memiliki dua makna. Pertama, makna secara umum yaitu segala sesuatu yang dijadikan wasilah bagi sesuatu yang lain dengan tanpa memerhatikan wasilah tersebut dibatasi dengan sifat *jawaz* (kebolehan). Asal dari pertimbangan *dzari'ah* adalah melihat apa penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut. suatu perbuatan itu hukumnya sama persis dengan apa yang diakibatkannya, baik itu akibat tersebut apakah memang seperti yang dimaksudkan dari perbuatan tersebut ataukah tidak. Jika perbuatan tersebut berakibat pada suatu yang diinginkan, maka itulah yang diinginkan. Dan jika perbuatan tersebut menyebabkan keburukan maka perbuatan tersebut dilarang. Pandangan terhadap akibat (hasil akhir) ini tidak menoleh pada niat si pelaku, melainkan pada hasil perbuatan tersebut. cukup dengan hasil ini suatu perbuatan dapat dipuji atau dicela.⁵³

Inilah makna umum yang mencakup oleh *syara'* baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Tegasnya, wasilah tersebut bisa diimajinasikan sebagai pembuka dan bisa juga diimajinasikan sebagai penutup. Cara untuk mencapai suatu yang mubah itu hukumnya pun mubah, sedangkan cara untuk mencapai sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Suatu yang apabila perkara wajib tidak bisa dilaksanakan

⁵² Totok Jumanoro, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta :Amzah,2005), h.205

⁵³ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 325

kecuali dengannya, maka segala sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.⁵⁴

Beberapa hal yang senantiasa menjadi pertimbangan dalam menentukan status hukum suatu perkara meliputi dua hal, yaitu :

Pertama, maqasid (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung *kemaslahatan* maupun *kemafsadatan* dalam artinya. Atau dengan kata lain, suatu yang secara esensinya (*dzatnya*) terdapat *kemaslahatan* ataupun *kemafsadatan*.

Kedua, *wasail* (sarana) yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (*maqasid*). Hukum *wasilah* itu tergantung pada akibatnya, bisa halal dan juga bisa haram. Hanya saja tingkatan hukumnya lebih ringan di banding tingkatan hukum *maqasid*.⁵⁵

Mengenai makna ini, Imam Al Qarafi dalam kitabnya *Tanqih Al-fushul* mengatakan “ketahuilah bahwa *dzari’ah* adalah *wasilah*. Sebagaimana *wasilah* yang mengakibatkan pada perkara haram itu hukumnya haram, maka demikian pula dengan *wasilah* yang mengakibatkan pada perkara wajib itu hukumnya wajib, seperti *sa’i* untuk ibadah haji dan shalat Jum’at. Hanya saja hukum *wasilah* itu lebih ringan tingkatannya dibandingkan dengan *maqasid*. *Wasilah* yang mengakibatkan *maqasid* yang paling buruk itulah *wasilah* yang paling buruk, dan yang menyebabkan *wasilah* pertengahan itulah *wasilah* pertengahan. Semua perbuatan ditinjau dari penghujungnya akan mendatangkan empat hasil :

⁵⁴ Ibid, h.326

⁵⁵ Ibid.

Pertama, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan secara pasti, seperti orang yang menggali sumur di belakang pintu yang gelap, maka tidak diragukan lagi orang yang akan masuk ke pintu tersebut akan tersebut akan terperosok. Juga seperti orang yang menggali sumur di jalan umum, jika perbuatan ini tidak diizinkan maka ini dilarang, dan jika hal itu diizinkan seperti orang yang menggali sumur di rumahnya kemudian mengakibatkan rusak tembok milik tetangganya. Dalam hal ini tidak diragukan lagi akan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu aspek bahaya lebih diutamakan dari pada asal penyakit, dalam hal ini perbuatan itu dilarang sebab menolak lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.⁵⁶

Kedua, perbuatan yang kemungkinan timbulnya kerusakan yang sangat jarang, seperti menanam anggur. Sebagaimana diketahui bahwa anggur bisa dijadikan sebagai *khamar*, dan ini dilarang. Akan tetapi kemungkinan menimbulkan bahaya itu sangat sedikit dan jarang sekali. Sebaliknya menanam anggur itu lebih banyak mendatangkan kemanfaatan.⁵⁷

Ketiga, timbulnya kerusakan menurut dugaan yang kuat (*ghalabah adz-zhaan*) bukan pengetahuan yang pasti. Misalnya adalah menjual senjata pada kondisi perang, dan menjual anggur untuk diproduksi anggur. Pada kondisi ini, jual beli diharamkan mengingat dugaan yang kuat tersebut

⁵⁶ Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Pustaka Al-Kautsar : Jakarta, 2014), h.327

⁵⁷ Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Pustaka Al-Kautsar : Jakarta, 2014), h.327

mengarah pada pengetahuan yang pasti. Yang sebisa dilarang sebagai bentuk kehati-hatian yang sebisa mungkin.⁵⁸

Keempat, perbuatan yang kebanyakan timbul merusak lebih besar. Hanya saja banyaknya itu tidak sampai pada dugaan yang kuat, apalagi pengetahuan yang pasti. Misalnya jual beli yang dilakukan sebagai sarana untuk riba. Seperti seorang pembeli yang membeli dengan harga rendah yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya dari penjual untuk transaksi dengan maksud okultasi tetapi dengan maksud sebenarnya memperkenankan riba. Jual beli seperti ini menimbulkan kerusakan meskipun tidak sampai pada dugaan yang kuat maupun pengetahuan yang pasti.⁵⁹

Dapat dipahami uraian di atas berkaitan dengan pengatur lalu lintas ilegal. Pengatur lalu lintas ilegal dalam praktiknya cenderung kepada *kemudharatan* yang lebih banyak dan fenomena tersebut memiliki kemanfaatan yang lebih sedikit. Selain dari pada itu fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang kerap kali memaksa untuk diberikan imbalan cenderung kepada tindakan meminta-minta (mengemis).

D. Aturan Pemerintah Tentang Lalu Lintas.

Pada dasarnya wewenang tinggi untuk menjalankan pemerintahan termasuk dalam hal pengaturan lalu lintas, dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Negara bertanggung jawab atas lalu

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

lintas dan angkutan jalan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah.⁶⁰ Hal ini menyangkut pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :

1. Urusan pemerintah di bidang jalan, dilaksanakan oleh kementerian negara dan bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintah pada bisang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintah di bidang pembangunan industri lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab pada bidang teknologi;
5. Urusan pemerintah pada bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional managemen dan rekayasa lalu lintas. Serta pendidikan berlalulintas dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.⁶¹

Perluasan dari pemberian wewenang dipertegas pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan bahwa

⁶⁰ Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 5 ayat (1), (2), (3)

⁶¹ Ibid.

kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat⁶². Pemerintah Daerah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (38) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah.⁶³ Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi diberikan secara utuh dan bulat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknik dan pengemudi.⁶⁴

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 menegaskan bahwa urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.⁶⁵ Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 96 ayat (4), (5), dan (6) yang berbunyi :

⁶² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Pasal 7 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶³ Ibid, Pasal 1 ayat (38)

⁶⁴ Ibid, Pasal 245 ayat (1).

⁶⁵ Ibid, Pasal 6 ayat (3)

Ayat (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁶⁶

Ayat (5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁶⁷

Pasal (6) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁶⁸

Jelas diterangkan di atas Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan di seluruh provinsi mencakup kabupaten atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait. Di dalam ketentuan yang sama dijelaskan pula bahwa urusan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota, termasuk pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan jalan di provinsi.

⁶⁶ Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Pasal 96 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁷ Ibid, Pasal 96 ayat (5)

⁶⁸ Ibid, Pasal 96 ayat (6)

Untuk kepentingan efektivitas pelayanan di daerah, maka wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah itu selanjutnya didelegasikan lagi ke Pemerintah Kabupaten atau Kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c yang menyebutkan : urusan Pemerintah Kabupaten atau kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten atau kota.⁶⁹ Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁷⁰

Selanjutnya Pasal 203 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas Pemerintah melakukan kebijakan yang dilaksanakan melalui : partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷¹

⁶⁹ Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 6 ayat (4) huruf c. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid, Pasal 226 ayat (1), (2), (3).

Pasal 238 ayat (1), Pemerintah menyediakan dan/atau memberikan pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 juga mengatur tentang larangan dan sanksi hukum yang berkaitan dengan lalu lintas . Pasal 28 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan termasuk fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).⁷²

Undang-Undang juga memberikan peluang kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 256 ayat (1), (2), huruf a, b, c, d yang berbunyi :

Pasal (1) masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dan angkutan jalan.
- b. Masukan pada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁷² Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Pasal 238 ayat (1) dan (2), tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan, dan
- d. Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁷³

Jelas yang dimaksud diatas adalah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan penjagaan kemanan, keselamatan, ketertiban, dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk partisipasi yang lain ialah berupa pemberian masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan pada tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat pusat daerah dapat juga dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan, dan dukungan terhadap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain dari ada itu undang-undang juga memberi peluang terhadap masyarakat sipil untuk berinisiatif secara swadaya memebrikan pengaturan lalu lintas pada situasi-situasi tertentu seperti : ketika terjadi kecelakaan besar yang

⁷³ Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Psal 256 ayat (1), (2) huruf a, b, c, d tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

harus melibatkan banyak personil kepolisian dan juga satuan polisi pamong praja bahkan dinas pehubungan pada waktu tersebut tidak memadai. Dalam situasi seperti ini masyarakat diperbolehkan untuk memberikan partisipasinya dalam pengaturan lalu lintas.

E. Tinjauan Pustaka.

Penulis bukanlah orang yang pertama atau satu-satunya orang yang mengkaji fenomena pengatur lalu lintas ilegal sebagaimana yang menjadi topic bahasan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian pada topik yang sama , diantaranya :

1. Fu'ad Syahrul Mukarrom. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwekerto tahun 2019 telah menulis sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Relawan Pengatur Lalu Lintas (*Supeltas*) Studi Kasus di Desa Pebantan Kecamatan Wana Sari Brebes”. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukannya adalah keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (*Supeltas*) sangat dirasa menguntungkan oleh para pengendara, sehingga meskipun tidak ada akad secara lisan, pengendara ikhlas untuk memebrikan tips kepada mereka. Karena *Pak Ogah* di Kecamatan Wana Sari Brebes tidak menimbulkan konflik dengan pengendara. Akhirnya pihak yang berwajib menjadikan *Pak Ogah* sebagai mitra tugas. Pemerintah setempat turut

memperhatikan dan memberdayakan *Pak Ogah* di Kecamatan Wana Sari Brebes.⁷⁴

2. May Suhardyanto. Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Yang menulis skripsi tentang judul “Fenomena Pekerja Anak Sebagai *Pak Ogah* di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan”. Kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah : latar belakang para pengatur lalu lintas ilegal (*Pak Ogah*) di kawasan Ciputat memiliki karakteristik yang beragam baik dari segi keluarga, usia, suku, dan agama. Faktor penyebab anak di bawah umur menjadi *Pak Ogah* ialah latar belakang ekonomi yang sulit. Anak-anak di Ciputat tidak memiliki biaya untuk bersekolah sehingga memilih menjadi *Pak Ogah*.⁷⁵

Bertitik tolak dari arah dan karakteristik penelitian yang telah diketengahkan di atas, nyatalah bahwa, meski pada sisi topik/tema, penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya, namun dari segi penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada status hukum pengatur lalu lintas ilegal di Kota Bandar Lampung. Lokasi dan sudut tinjauan nampak

⁷⁴L. Fu'ad Syahrul Muarrom, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas)*”, (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019). h.56.

⁷⁵ May Suhardyanto, “*Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pak Ogah di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan*” (Skripsi Program Sarjana Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015) h.41

jelas adanya perbedaan, hal mana dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung dan dari segi analisis penulis melibatkan pula prespektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Adib Bisri Musthofa, Terjemahan Shahih Muslim Semarang :CV. Asy Syifa’ 1993.

Amru Nur Kholis, Pekerjaan Haram Di Akhir Zaman 15 Profesi Haram yang Akan Meraja Lela Menjelang Datangnya Hari Kiamat, Surakarta : Granata Mediatama,2017.

Bamban Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam, Yogyakarta : Kreasi Total Media,2018.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Permata Press,2019.

Facri Fachrudin, Fiqh Bekerja, “Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia” *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 21 Desember 2019

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Pranada Media Group,2018.

Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqh*, Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Nanang Martono,*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Sekunder*, Depok :PT Rajagrafindo Persada,2012.

Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : PT.Bumi Aksara,2006.

Warul Walidin, Saifullah,Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* Aceh: FTK Ar-Raniry Press,2006.

Totok Jumatoro, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
Zentrum für Lehrer Innenbildung, Praxisphasen Innovativ, Köln :
Universität zu Köln, 2020.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undnag Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. JURNAL

Facri Fachrudin, Fiqh Bekerja, “Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia” *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 21 Desember 2019.

Galang Surya Gumilang, “Induktif dalam konteks ini peneliti melahirkan teori baru atau mengembangkan teori berdasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian lapangan”, *Jurnal Fokus Konseling* Vol. 2 No. 2 Agustus 2016.

Imra Atul Husna Lukra, “Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang”, *Jurnal Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang*, Januari 2019.

Rahmi Ramadhan Syafri, “ Profil Anak Putus Sekolah Sebagai Pak Ogah di Kota Padang”, *Jurnal kajian Sosiologi dan Pendidikan Universitas Negeri Padang* Vol. 2 No.3 Januari 2019.

Salmon Praiji Pratama, “Field research merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang di berikan oleh anggota masyarakat pada prilaku kenyataan sekitar”. *Problematika Penerapan Metode Field Research untuk penelitian arsitektur vernacular di Indonesia*, Vol.34 No.1 Bandung 2006.

D. SKRIPSI

Fitriansyah dalam skripisinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

May Suhardyanto, “Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” di Kecamatan Ciputat.”. Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

E. WAWANCARA

Sunaryo Hasan, wawancara dengan penulis, rekaman suara, Bandar Lampung, 14 Maret 2020.

Danu Hartawan, wawancara dengan penulis, rekaman suara, Bandar Lampung, 20 Maret 2020.

Kori Mulyani, wawancara dengan penulis, rekaman video, Bandar Lampung, 2 April 2020.

Boy Sembaba Tarigan, wawancara dengan penulis, rekaman suara, 06 Maret 2020.

Refdhan Saputra, wawancara dengan penulis, rekama video, Bandar Lampung, 10 Maret 2020.

Anita Hasibuan, wawancara dengan penulis, rekaman suara, Bandar Lampung, 21 April 2020.

David Evgenovic Kirnos, wawancara dengan penulis, rekaman suara, Bandar Lampung, 07 April 2020.

Gunawan, wawancara dengan penulis, rekaman video, Bandar Lampung, 02 Maret 2020.

Paryanto, wawancara dengan penulis, rekaman suara, Bandar Lampung 03 Maret 2020.

AKP.Rohmawan, wawancara dengan penulis, rekaman video, Bandar Lampung, 04 Maret 2020.

F. INTERNET

Menurut Ibnu Khaldun bahwasanya rezeki dan nafkah adalah sama. Yaitu penghasilan yang bermanfaat dan berguna untuk memenuhi kebutuhan.”(On-line) tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/56380-ID-konsepsi-islam-tentang-kerja-rekonstruks.pdf> pekerjaan halal (03 Januari 2020 21;11 WIB) dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tjutju Soendari, “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala”. Metode Penelitian Deskriptif, (2012), h. 2 dilihat di 3.amazonaws.com/academia. dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.